

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan mengenai bagaimana peran koperasi unit desa sebagai lembaga perekonomian rakyat pedesaan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji tentang peran lembaga perekonomian rakyat pedesaan serta lembaga pendukungnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Abi Pratiwa Siregar (Tesis Mahasiswa Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul *“Efisiensi Koperasi Unit Desa (KUD) di Daerah Istimewa Yogyakarta”* dengan rumusan masalah sebagai upaya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi KUD di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dekomposisi menjadi tiga dimensi dan ditemukan hasil akhir bahwa sebagian besar Koperasi Unit Desa (KUD) di Daerah Istimewa Yogyakarta belum efisien.

Penelitian diatas memiliki fokus mengenai efisiensi KUD secara keseluruhan hal tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung data peneliti saat ini karena dari data tersebut peneliti mendapatkan faktor-faktor ketidak efisienan. Hanya ada beberapa hal seperti dimensi, lokasi dan iklim ekonomi yang akan sedikit berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin Soleh (Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember) yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul *“Tanggung Jawab Anggota Terhadap Kerugian yang Berada di Koperasi Unit Desa (Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)”* ditemukan hasil akhir bahwa anggota koperasi dari KUD gunung makmur dianggap tidak dapat berperan aktif dalam kegiatan koperasi, Anggota hanya

menginginkan peran KUD seperti pelayanan dan jaminan lain yang diberikan dari KUD tersebut, akan tetapi kewajiban sebagai anggota koperasi tidak dijalankan. Anggota koperasi tidak pernah menjalankan kewajibannya yaitu mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan para anggota koperasi kurang aktif dalam kegiatan koperasi.

Penelitian diatas berfokus pada peran anggota, sedangkan fokus dari peneliti sekarang yaitu peran koperasi dengan dukungan lembaga-lembaga terkait dalam era modern saat ini.

3. Penelitian yang dilakukan Vella Wahyu Febrianka (Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya) yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “*Kinerja Koperasi-Studi tentang faktor-faktor penyebab tidak aktifnya koperasi Gotong Royong Kota Blitar*” dengan rumusan masalah kinerja koperasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi aktif atau tidaknya koperasi hingga ditemukan hasil akhir dari penelitian yang memiliki empat indikator yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), dan *impact* (dampak). Selain ke empat indikator tersebut, kurang sinkron dan kerjasama antara dinas terkait, koperasi, dan pemerintah dinilai masih kurang. kurangnya pembinaan dari dinas serta minimnya perhatian dari pemerintah, ditambah kepasifan dari pihak koperasi menambah daftar panjang faktor-faktor kinerja koperasi.

Penelitian diatas berfokus pada faktor-faktor penyebab *pailit*-nya suatu koperasi, sedangkan peneliti saat ini ingin berfokus pada peran koperasi serta adakah reduksi peran lembaga terkait yang tidak sesuai di era modern saat ini. Akan tetapi, data dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi bagi peneliti karena lokasi yang sama-sama di Blitar.

B. Konsep Peran

1. Definisi Peran

- a. Menurut Schaefer (2012:118) mendefinisikan peran sosial (*Role Conflict*) adalah serangkaian harapan dari orang ketika menduduki suatu posisi atau status sosial tertentu. Terdapat konflik peran, tuntutan peran serta lepas peran dalam proses interaksi sebagai kontribusi stabilitas masyarakat.
- b. Menurut Soekanto (2015:215) mendefinisikan peranan (*Role*) sebagai aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peranan mencakup tiga hal berikut:
 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
 2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan pengertian peranan sosial (*Role Conflict*) dan peranan (*Role*) yang sudah dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran sendiri merupakan batasan dari perilaku seseorang yang menduduki suatu posisi dalam kehidupan sosialnya guna mempertahankan keberlangsungan struktur masyarakat.

2. Peranan Masyarakat dan Pemerintah dalam Proses Kesejahteraan Sosial (Fahrudin,2012:80-81)

- a. Cakupan Peran Masyarakat dalam proses kesejahteraan Sosial
 1. Mewujudkan kondisi dinamis sebagai pedoman upaya pemerintah.

2. Menyelenggarakan pengelolaan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh para pelaku dalam masyarakat.
3. Melaksanakan usaha kesejahteraan sosial terutama yang bersifat pemeliharaan
4. Menjadi sumber informasi untuk penentuan kebijakan dan perumusan program.
- b. Cakupan peranan pemerintah dalam proses kesejahteraan sosial
 1. Menentukan garis untuk membimbing, memelihara dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.
 2. Menumbuhkan, mendorong, meningkatkan, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat termasuk dalam menciptakan iklim kondusif.
 3. Mengawasi usaha kesejahteraan sosial terutama mengenai tepat sasaran atau tidaknya suatu penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut.
 4. menyediakan pola, bentuk, sistem pelayanan sosial yang mencakup kebijakan, pengelolaan, dan perumusan program operasional.
3. Konsep untuk Menggolongkan Fenomena Peran
 1. Aksi (*Action*)

Perilaku yang dibedakan berdasarkan pernah atau tidaknya hal tersebut dipelajari, berfokus pada tujuan, serta terdapat aspek kehendak di dalam perilaku tersebut.
 2. Patokan (*Prescription*)

Perilaku ini menunjukan suatu keharusan untuk dilakukan. Patokan dibedakan menjadi 2, yaitu: (a) Patokan tak kasat mata (*Covert*) disebut norma, (b) Patokan kasat mata disebut tuntutan (*demand*).

3. Penilaian (*Evaluation*)

Perilaku ini berkaitan dengan setuju atau tidak setuju-nya seseorang terhadap pilihan orang lain. Hal ini terungkap pada 2 hal yaitu adanya imbalan (*reward*) atau hukuman (*punishment*).

4. Paparan (*Description*)

Perilaku ini bersifat deskriptif dengan adanya pemaparan proses dan fenomena. Paparan dibedakan menjadi 2 yaitu paparan tak kasat mata disebut konsepsi (*conception*) sedangkan paparan kasat mata disebut pernyataan (*statement*).

5. Sanksi

Perilaku akan dipertimbangkan apabila dalam kegiatannya menimbulkan perubahan kearah *positive* maupun *negative* tergantung pada apakah perilaku tersebut diharapkan atau tidak diharapkan.

Tabel 1. Peristilahan untuk pemilahan konsep perilaku baik perorangan ataupun kumpulan orang

| Pembedaan Pemilahan menurut Perilaku | Orang | | Kumpulan Orang | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | Tak Kasat | Kasat Mata | Tak kasat | Kasat Mata |
| Aksi | Motif perorangan | Kinerja perorangan | Motif kumpulan orang | Kinerja kumpulan orang |
| Patokan | Norma perorangan | Tuntutan perorangan | Norma kumpulan orang | Tuntutan Kumpulan Orang |
| Penilaian | Nilai perorangan | Tafsiran perorangan | Nilai kumpulan orang | Tafsiran kumpulan orang |
| Paparan | Konsepsi perorangan | Pernyataan perorangan | Konsepsi kumpulan orang | Pernyataan kumpulan orang |
| Sanksi | Sanksi tak kasat mata perorangan | Sanksi kasat mata perorangan | Sanksi tak kasat mata kumpulan orang | Sanksi kasat mata kumpulan orang |

Sumber: Suhardono, 1994:17

C. Konsep Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “Kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “Kerja sama”. Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” (dalam Sitio, 2001:17) mendefinisikan Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘semua buat seorang dan seorang buat semua’. Dalam hal tersebut guna memahami koperasi sebagai dimensi ganda (Ekonomi dan Sosial) ada penjelasan mengenai kerjasama koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja dan bermain dalam masyarakat.
- b. Fungsi Ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerjasama dalam masyarakat.
- c. Fungsi Politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
- d. Fungsi Etika, yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Di Indonesia sendiri kerjasama sudah dikenal lama dengan istilah Gotong Royong, Gotong Royong merupakan budaya masyarakat Indonesia yang menjadikan Indonesia dikagumi oleh negara lain karena mampu hidup dengan toleransi tinggi antar sesama manusia.

2. Sejarah Koperasi

Koperasi lahir pertama kali di negara Inggris di kota *Rochdale* pada tahun 1844. Koperasi muncul karena adanya revolusi industri. Koperasi yang pertama kali didirikan di Inggris ini sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi di Inggris maupun diluar Inggris. Pada awalnya koperasi disediakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi dengan adanya penambahan modal koperasi setiap harinya maka koperasi mulai memproduksi barang yang akan dijual dibawah manajemen koperasi itu sendiri.

Menurut Sitio dan Tamba (2011:9) dalam sejarahnya koperasi berkembang keseluruh dunia disamping badan usaha lainnya yang juga terus berkembang. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi diberbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk *Internasional Cooperative Alliance* (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

Sedangkan untuk di negara Indonesia sendiri, KUD (Koperasi Unit Desa) berawal dari Koperta (Koperasi Pertanian) dan BUUD (Badan Usaha Unit Desa), pada tahun 1963 pemerintah membentuk koperta dengan tujuan mengakomodasikan seluruh kegiatan perekonomian pedesaan. Pada tahun 1966-1967 dikembangkan BUUD (Badan Usaha Unit Desa) sebagai tindak lanjut dari Koperta. BUUD merupakan penggabungan antara Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa yang ada dalam satu unit desa. Tugas utama BUUD pada saat itu sebagai penyokong produktivitas pertanian pedesaan kala itu. perkembangan koperasi indonesia awalnya hanya dari kegiatan kecil masyarakat secara spontan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar serta penambahan ekonomi keluarga dengan modal pribadi.

Untuk saat ini koperasi unit desa berpusat di kecamatan, untuk kegiatan usaha tertentu seperti peternakan dan pertanian, pada desa-desa memiliki koperasi anak cabang sebagai penampung dan pemasok hasil serta kebutuhan usaha peternakan dan pertanian di musim-musim panen tertentu. Untuk usaha lembaga perekonomian rakyat pedesaan banyak melibatkan masyarakatnya akan tetapi sudah banyak anggapan bahwa koperasi tidak berjalan seperti dulu lagi karena pengurus bukan orang dari desa asli serta perkembangan zaman juga mempengaruhi usaha serta perputaran ekonomi. Meskipun berada di pedesaan, saat ini sudah banyak ditemukan usaha yang serupa dengan usaha koperasi unit desa yang menyebabkan persaingan semakin ketat dan harus banyak ide kreatif guna mengimbangi perkembangan zaman serta kebutuhan zaman yang semakin modern.

3. Konsep Koperasi Barat, Sosialis dan Negara Berkembang

Munkner (dalam Sitio, 2001:1) membedakan konsep koperasi menjadi dua: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara berpaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di negara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut.

Dengan demikian Konsep koperasi dibagi menjadi tiga bagian, yang *Pertama* adalah konsep koperasi barat yang dibentuk secara sukarela dengan bersama-sama oleh orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, sehingga ada keuntungan timbal balik bagi anggota serta bagi kegiatan koperasi setiap harinya. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari kelompok maupun perorangan, jika dikaji lebih jauh lagi hal tersebut memiliki unsur negatif akan tetapi juga ada keseimbangan dari unsur positif.

Kedua adalah konsep koperasi sosialis yang bersifat *Top Down*, adapun kegiatan tersebut berpusat dan dikendalikan oleh pemerintah dengan maksud penyetaraan dan perbaikan guna menunjang kegiatan administratif nasional.

Ketiga adalah koperasi negara berkembang, mengacu pada kedua konsep diatas, yaitu barat dan sosialis. Namun koperasi ini sudah memiliki ciri-ciri tersendiri dimana campur tangan pemerintah dalam hal pembinaan dan pengembangannya lebih dominan karena keterbatasan sumberdaya manusia dan modal, maka hal ini dapat dimaklumi guna menumbuhkan dan mengembangkan koperasi tersebut sesuai dengan perkembangan negara-nya.

Karena indonesia berada dalam jajaran negara berkembang, koperasi unit desa indonesia masih memiliki ciri-ciri adanya campur tangan pemerintah dalam hal pelaksanaan seperti pembinaan dan permodalan, ada bantuan dari pemerintah melalui dinas atau lembaga pemerintahan terkait.

D. Konsep Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

a. Friedlander (dalam Fahrudin, 2012:9)

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standart hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat”.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

c. Segal dan Brzuzy (dalam Suud,2006:5)

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari masyarakat. kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat”.

Pada masyarakat indonesia anggapan terhadap kesejahteraan sosial apalagi bagi masyarakat umum pedesaan sangatlah sederhana, sebagai contoh: bisa makan 2 kali sehari, memiliki uang banyak dan harta melimpah akan tetapi, berdasarkan pengertian kesejahteraan sosial yang sudah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, material, spiritual, biologis sosial dan intelektual dalam menunjang eksistensi kehidupan individu, kelompok dan komunitas.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa inggris memakai istilah *society* yang berasal dari bahasa latin *socius*, yang berarti “kawan”.

- a. Koentjaraningrat (1990:144) mengemukakan pandangannya mengenai Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah saling “berinteraksi”. Sedangkan,
- b. Maclver dan Page (dalam Soekanto, 2015:21) menyatakan Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.

Untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Selain itu demi menyesuaikan dan menghadapi manusia lain sering kali ada proses komunikasi untuk menyempurnakan dan memperluas relasi agar tercapainya kedamaian di lingkungannya.

Berdasarkan pengertian masyarakat yang sudah dikemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang saling membutuhkan makhluk lainnya demi terwujudnya *equilibrium* kehidupan sosial.

3. Pengertian Masyarakat Pedesaan

Menurut Soekanto (2015:134) Warga pedesaan, adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat Pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Warga memiliki hubungan yang lebih erat.
- b. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan.
- c. Umumnya hidup dari pertanian.
- d. Golongan orang tua memegang peranan penting.
- e. Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal.
- f. Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan.
- g. Kehidupan keagamaan lebih kental,
- h. Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota.

Saat ini masyarakat pedesaan sudah mulai mengikuti perkembangan zaman dengan persebaran informasi yang semakin cepat, juga dikatakan bahwa ada beberapa budaya masyarakat pedesaan yang mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit sebagai contoh budaya gotong royong.

4. Indikator Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan dirasa penting dalam kehidupan masyarakat karena sebagai modal utama dalam persaingan perkembangan zaman serta teknologi pengetahuan. Dengan pendidikan yang dimiliki seseorang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dalam hal sosial maupun ekonomi berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki orang tersebut. Dasar utama pendidikan dengan mutu dan kualitas tinggi ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah.

b. Kesehatan

Kualitas kesehatan yang semakin baik dan merata dapat mempengaruhi kesejahteraan secara pendidikan dan ekonomi. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya, untuk memenuhi kualitas kesehatan maka pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan akses seperti jaminan sosial bagi rakyat dengan ekonomi rendah.

c. Ekonomi

Menurut Ferguson, Horwood, dan Beutrais (dalam Sunarti, 2006:Online) Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. input yang dimaksudkan baik berupa pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran, sementara indikator output memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk.

Ekonomi sebagai hal utama yang dijadikan indikator kesejahteraan menurut pandangan awam seseorang, padahal belum pasti yang memiliki tingkat ekonomi

tinggi memiliki suasana hati yang sejahtera begitupun seseorang dengan tingkat ekonomi yang kurang tidak sejahtera, justru bisa jadi malah sebaliknya, orang-orang dengan ekonomi tinggi tidak bahagia karena harus memikirkan tanggungan hutang dimana-mana lalu seseorang ekonomi rendah hidup sederhana tetapi tidak memikirkan hutang yang harus dibayar ketika seseorang tersebut bangun pagi.

Indikator kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari adanya pemerataan dan jumlah pendapatan, masyarakat diberikan Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

